

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
A.	PROSES (60)								
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	5,0		5,00	100,00%			
		1 Tim Kerja (1)	1,0		1,00	100,00%			
		a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah membentuk Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/22/OT.00/SK.KPN/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/24/OT.00/SK/KPN/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. 3. Dokumen Sosialisasi Tim Kerja Pembangunan ZI PN Banjarnegara	Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
		b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?		A/B/C	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan penentuan anggota tim melalui prosedur dan mekanisme yang jelas	Dokumen Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI PN Banjarnegara (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita acara, Foto Dokumentasi).	a. Dengan prosedur/mechanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
		2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1,0		1,00	100,00%			
		a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah membuat Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	1. Dokumen Rapat Persiapan Rencana Kerja/ Rencana Aksi (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 2. Dokumen Rapat Area Tim I (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 3. Dokumen Rapat Area Tim II (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 4. Dokumen Rapat Area Tim III (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 5. Dokumen Rapat Area Tim IV (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 6. Dokumen Rapat Area Tim V (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 7. Dokumen Rapat Area Tim VI (undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 8. Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II Nomor W12-U26/24/ OT.00/SK /KPN/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Rencana Aksi/ Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Banjarnegara. 9. Dokumen Sosialisasi Rencana Aksi/ Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Pengadilan Negeri Banjarnegara (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi).	Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
		b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A/B/C	A	1	Dalam Dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Banjarnegara terdapat target-target prioritas yang relevan dengan WBK/WBBM	Dokumen Rencana Kerja/ Rencana Aksi Area I sampai dengan Area VI yang didalamnya terdapat target-target prioritas.	a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	Y/T	Ya	1		Telah disosialisasikan melalui media masa (Radio, koran, media online), website	1. Publikasi melalui Media Massa (Radio, Koran, Media Online). 2. BA Publikasi Zona Integritas dari Radio, CD, Foto Penyiar Radio. 3. Capture Website Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 4. Capture youtube video Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 5. Foto Banner/ spanduk terkait Pembangunan Zona Integritas.	Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)				2,00	100,00%			
			a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	A/B/C/D	A	1		Semua Kegiatan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1. Dokumen Laporan Kegiatan Rencana Kerja Area I sampai dengan Area VI. 2. Dokumen Acara penanda tanganan pakta integritas Pengadilan Negeri Banjarnegara. (Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Foto Dokumentasi). 3. Dokumen Acara penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. (Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 4. Foto Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 5. Dokumen Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM 6. Dokumen Acara Ikrar Bersama dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Aparatur Pengadilan Negeri Banjarnegara. (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 7. Foto Piagam Ikrar Bersama Pembangunan Zona Integritas 8. Foto Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas.	a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
			b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melaksanakan monitoring dan evaluasi per bulan	1. Lembar Kegiatan Evaluasi (LKE). 2. Dokumen Kegiatan Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM Pengadilan Negeri Banjarnegara 3. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/36/OT.00/SK/KPN/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II 4. Dokumen Laporan Hakim Pengawas Bidang	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
			c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	A/B/C/D	A	1		Semua laporan monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti	1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi). 2. Laporan Hasil Evaluasi Rencana Aksi dari masing-masing Tim Area dari Area I sampai dengan Area VI. 3. Dokumen Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan	a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)				1,00	100,00%			

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	Y/T	Ya	1		ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan teladan secara nyata, KPN & WKPN memantau laporan disiplin kehadiran hakim dan pegawai setiap hari	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/26/OT.00/SK.KPN/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Role Model Pembangunan ZI 2. Daftar Hadir Pimpinan dalam setiap agenda kegiatan Pembangunan ZI 3. Dokumen Apel Senin Pagi dan Jumat Sore 4. Dokumen Rapat Berjenjang 5. Dokumen Rapat Bulanan 6. Dokumentasi Banner Role Model Pembangunan Zona Integritas	Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
		b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	Y/T	Ya	1		Agen Perubahan sudah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Tentang Penunjukan Agen Perubahan sebagai Role Model Pembangunan Zona Integritas	1. Rapat pemilihan Agen Perubahan (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Dokumentasi) 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II Nomor W12-U26/25/OT.00/SK//KPN/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II 3. SK KPN Banjarmasin Kelas II Nomor W12-U26/27/KP.07.01/ SK/ KPN/2/2019 Tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Agen Perubahan sebagai Role Model Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II 4. Rencana Kerja Agen Perubahan 5. Laporan Hasil Kegiatan Rencana Kerja Agen Perubahan 6. Dokumentasi Banner Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas	Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
		c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin teah melaksanakan pembanguna budaya kerja dan pola pikir	1. Foto Penyerahan Piagam Pegawai dengan kinerja terbaik. 2. Foto Piagam Pegawai dengan Kinerja Terbaik 3. Rekap Absensi Pegawai 4. Dokumen Apel Senin Pagi dan Jumat Sore 5. Dokumen Rapat Berjenjang 6. Dokumen Rapat Rutin Bulanan 7. SK KPN Banjarmasin Kelas II Nomor W12-U26/2/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Struktur, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola dan Petugas Meja PTSP 8. Capture Aplikasi PTSP 9. Capture Apliasi Antrian PTSP 10. Capture Aplias Survei IKM 11. Foto Petugas PTSP 12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II Nomor W12-U26/ 17/ OT.00/ SK/KPN/ 2019 Tanggal 16 Januari 2019 tentang Penvediaan Ruang	Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	A/B/C/D	A	1		Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;	Dokumen daftar hadir seluruh pegawai dalam setiap kegiatan Pembangunan Zona Integritas.	<p>a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;</p> <p>b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)		5,0		4,84	96,70%			
	1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1,5		1,34	89,00%			
		a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A/B/C/D	A	1		Sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi	SK KPN Banjarnegara Nomor W/12.U26/31/OT.00/SK/KPN/11/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Oprasional Prosedur	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
		b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	A/B/C/D	B	0,67		Sudah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi	1. SOP Hakim 2. SOP Panitera 3. SOP Sekretaris 4. SOP Kepaniteraan Pidana 5. SOP Kepaniteraan Perdata 6. SOP Kepaniteraan Hukum 7. SOP Panitera Pengganti 8. SOP Juru Sita 9. SOP Subbag Umum dan Keuangan 10. SOP Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 11. SOP Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
		c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A/B/C/D	A	1		Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan/revisi SOP terbaru	1. Dokumen Sosialisasi SOP yang terdiri dari: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Berita Acara d. Notulen e. Dokumentasi 2. Dokumen Rapat Evaluasi SOP: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Berita Acara d. Notulen e. Dokumentasi 3. Lembar Revisi SOP Hakim, SOP Panitera, SOP Sekretaris, SOP Kepaniteraan Pidana, SOP Kepaniteraan Perdata, SOP Kepaniteraan Hukum, SOP Panitera Pengganti, SOP Juru Sita, SOP Subbag Umum dan Keuangan, SOP Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SOP Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
	2	E-Office (2)	2,0		2,00	100,00%			
		a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menggunakan aplikasi SKP dan Kinerja Penyelesaian Perkara melalui Aplikasi SIPP	1. Capture Aplikasi SKP 2. Capture Aplikasi SIPP 3. Capture Aplikasi LLK di SIMARI 4. Contoh Buku Bantu LLK 5. Capture Monitoring Implementasi SIPP	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menggunakan Teknologi Informasi	1. Capture Aplikasi antrian pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima 2. Capture Aplikasi SIKEP 3. Capture Aplikasi SAIBA 4. Capture Aplikasi SIMAK 5. Capture Aplikasi PTSP 6. Capture Aplikasi Komdanas 7. Capture Berita website 8. Capture Aplikasi Antrian Sidang 9. Capture Aplikasi Antrian PTSP 10. Capture Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
			c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Pemberian layanan kepada Publik pada pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menggunakan Teknologi Informasi	1. Capture Aplikasi SIWAS 2. Capture Aplikasi PTSP 3. Capture Aplikasi SIPP	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
			d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	1. Dokumen Laporan Komdanas Bulanan 2. Laporan Bulanan Hakim Pengawas PTSP	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)			1,5				
						1,50	100,00%			

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Y/T	Ya	1		Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II sudah diterapkan	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12-U26/45/OT.00/SK/KPN/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12-U26/34/OT.00/SK/KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II 3. Buku Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4. Laporan Hakim Pengawas PTSP 5. Publikasi DIPA dalam Website PN Banjarnegara 6. Laporan Realisasi DIPA 01 Januari-Februari 2019 7. Laporan Realisasi DIPA 03 Januari-Februari 2019 8. Foto Banner Realisasi Anggaran Bulan Januari-Desember 2018	Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
		b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	1. Laporan Tahunan Penyelesaian Pengaduan Tahun 2018 2. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Periode Januari s/d Desember 2018	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)		15,0		14,75	98,33%			
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)	2,0		2,00	100,00%			
		a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	1. SK KPN Nomor W12.U26/23/OT.00/SK.KPN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi pada PN. Banjarmasin Kelas II 2. Foto Banner Struktur Organisasi PN. Banjarmasin Kelas II. 3. SK KPN Nomor W12.U26/21/OT.00/SK.KPN/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pegawai 4. Dokumen Analisa Beban Kerja 5. Dokumen Peta Kekuatan Pegawai 6. Dokumen Analisis Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin 7. Dokumen Analisis Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin.	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
		b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	A	1	Penempatan pegawai hasil rekrutmen di pengadilan negeri Banjarmasin Kelas II telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	1. SK SEKMA Nomor 402/SEK/CPNS/04.1/SK/XI/2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil / Cakim di Lingkungan MARI 2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 402/Bua.2/KP.00.3/2/2018 a/n NUR KHAYYU KOYUMI, SH sebagai CPNS/Cakim pada PN Banjarmasin	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
		c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	1. Laporan Tahunan Subbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/23/KP.07.01/SK.KPN/2/2018 tanggal 5 Februari 2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 3. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019 4. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
	2	Pola Mutasi Internal (2)	2,0		2,00	100,00%			
		a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah melakukan pengembangan karier pegawai, dengan melakukan mutasi pegawai antar jabatan	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/37/KP.07.1/SK.KPN/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pola Mutasi/Rotasi Internal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/76/KP.04.5/SK.KPN/7/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penempatan Dan Pembagian Tugas Pegawai 3. Surat Usulan Formasi Jabatan 4. Surat Usulan CPNS menjadi PNS	Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	A/B/C/D	A	1		Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan Pengadilan Negeri Banjarnegara telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/10/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pembentukan Baperjakat 2. Dokumen Rapat Tim Baperjakat: a. Daftar Rekomendasi b. Berita Acara c. Daftar Hadir	a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
		c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/76/KP.04.5/SK.KPN/7/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penempatan Dan Pembagian Tugas Pegawai	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi ?	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi.	1. Dokumen Analisa Beban Kerja 2. Peta Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen Analisis Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara 4. Dokumen Analisis Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara. 5. Analisa Pengembangan Kompetensi 6. Surat Usulan Untuk Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dan Tingkat IV 7. Buku Catatan Diklat 8. Sosialisasi E-Court 9. Sosialisasi Penerapan Mesin EDC 10. Sosialisasi Sakip 2019 Sosialisasi Keputusan Kma Ri Nomor.1-144/Kma/Sk/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan 11. Rapat Kerja Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 12. Rapat Berjenjang 13. Rapat Bulanan	Ya, jika sudah dilakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi
		b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A/B/C/D	A	1		Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Banjarnegara telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	1. Dokumen Analisa Beban Kerja 2. Peta Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen Analisis Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara 4. Dokumen Analisis Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara. 5. Analisa Pengembangan Kompetensi	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A/B/C/D	A	1		persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%	1. Dokumen Analisa Beban Kerja 2. Peta Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen Analisis Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin 4. Dokumen Analisis Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin. 5. Analisa Pengembangan Kompetensi	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A/B/C/D	A	1		Seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	1. Pengusulan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dan Tingkat IV 2. Diklat SPPA 3. Diklat Bendahara 4. Buku Catatan Pendidikan Dan Pelatihan Pengadilan Negeri Banjarmasin	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.	Surat Tugas Mengikuti Diklat	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
			f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan tiap Tahunan	1. Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
		4	Penetapan kinerja individu (4)			4,0				
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1		Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1		Ukuran kinerja individu di pengadilan Negeri Banjarnegara telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	1. Target SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala 2. Target SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 3. Target SKP Kepala Sub Bagian Umum	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A/B/C/D/E	B	0,75		Pengukuran kinerja individu di Pengadilan Negeri Banjarnegara dilakukan secara triwulanan	1. Dokumen SKP Panitera 2. Dokumen SKP Sekretaris 3. Dokumen SKP Hakim 4. Dokumen SKP Staf 5. Surat Pernyataan Telah Reviu	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	A/B/C/D	A	1		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/11/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Role Model 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/12/KP.07.01/SK/KPN/1/2019 tentang Penunjukan Role Model 3. SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor W12-U26/ 27/ KP.07.01/ SK/ KPN/2/2019 Tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Agen Perubahan sebagai Role Model Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II 4. Dokumentasi banner role model 5. Dokumentasi banner agen perubahan 6. Dokumentasi foto pemberian reward/penghargaan kepada Role Model dan pegawai dengan kinerja terbaik 7. Piagam Penghargaan kepada Role Model 8. Buku Catatan Piagam Penghargaan	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/35/OT.00/SK/KPN/2/2009 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja, Budaya Kerja, Budaya Tertib dan Budaya Bersih bagi Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorar 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/9/KP.02.1/SK.KPN/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pengawas Disiplin Kerja, Penanggung Jawab Daftar Hadir/Pulang, Penanggung Jawab Apel dan Petugas Daftar Hadir/Pulang 3. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/14/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai 4. Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pulang Pegawai Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 5. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang Terlambat Hadir 6. Buku sanksi/hukuman disiplin 7. Surat Permohonan Ijin Keluar 8. Surat Ijin Keluar Kantor 9. Undangan dan Surat Tugas Dinas Luar 10. Buku Catatan Surat Tugas 11. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/23/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tentang Penunjukan Petugas Piket Siang, Piket Malam dan Piket Sidang 12. Contoh Dokumen Absensi Manual Pegawai Yang Terlambat Hadir 13. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/12a/KP.07.01/SK.KPN /1/2019 Tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Hukuman Disiplin Kerja (Punishment)	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)			1,00	100,00%			
		a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A/B/C/D	A	1		Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan	1. Dokumen data SIKEP terlampir 2. Daftar Riwayat Pekerjaan	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)				9,64	96,43%			
	1 Keterlibatan pimpinan (5)	10,0			5,00	100,00%			
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		Y/T	Ya	1		Pimpinan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	1. SK KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/31d/KP.07.01/SK/KPN/1/2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Tahun Anggaran 2019 Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II 2. Dokumen Rapat Area IV (Penguatan Akuntabilitas) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM 3. Dokumen Rapat Kerja Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2018 4. Dokumen Rapat Kasubag Program Kerja Tahun 2019 5. Dokumen Sosialisasi SAKIP 2019 6. Sosialisasi DIPA Tahun 2019 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 7. Dokumen Sosialisasi DIPA Tahun 2019 8. RKA-K/L DIPA 098040 (01) Tahun Anggaran 2019 9. RKA-K/L DIPA 099127 (03) Tahun Anggaran 2019	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Y/T	Ya	1		Pimpinan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	1. Dokumen Rapat Kerja Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2019 3. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2018	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Y/T	Ya	1		Pimpinan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara telah memantau pencapaian kinerja secara berkala	1. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV Januari s/d Desember Tahun 2018 2. LKJIP Tahun 2018 3. LKJIP Tahun 2017 4. SK. KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/24/KP.07.01/SK.KPN/2/2018 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 5. Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W12.U/1760/HK.01/7/2018 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
	2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5,0			4,64	92,86%			

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	A/B/C	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)	1. Dokumen LKJIP Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2019 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2018 5. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2017 6. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama 7. Dokumen Indikator Kinerja Utama 2019 8. Dokumen Indikator Kinerja Utama 2018 9. Dokumen Reviu Rencana Strategis 2015-2019 (tahun 2019) 10. Dokumen Reviu Rencana Strategis 2015-2019 (tahun 2018) 11. Dokumen Matrik Rencana Strategis PN Banjarnegara Tahun 2015-2019 12. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 pada PN Banjarnegara Kelas II 13. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31a/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019 14. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31b/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019 15. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31c/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis PN Banjarnegara Kelas II 16. Dokumen SK KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/23/KP.07.01/SK.KPN/2/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Rencana Strategis PN Banjarnegara Tahun 2018	a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
			b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	A/B/C/D	A	1		Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	1. Dokumen LKJIP Tahun 2018 2. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2019 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2018 5. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2017 6. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama 7. Dokumen Indikator Kinerja Utama 2019 8. Dokumen Indikator Kinerja Utama 2018 9. Dokumen Reviu Rencana Strategis 2015-2019 (tahun 2019) 10. Dokumen Reviu Rencana Strategis 2015-2019 (tahun 2018) 11. Dokumen Matrik Rencana Strategis PN Banjarnegara Tahun 2015-2019 12. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 pada PN Banjarnegara Kelas II 13. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31a/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019 14. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31b/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019 15. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31c/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis PN Banjarnegara Kelas II 16. Dokumen SK KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/23/KP.07.01/SK.KPN/2/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Rencana Strategis PN Banjarnegara Tahun 2018	a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
			c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	A/B/C	B	0,5		Pengadilan Negeri Banjarnegara telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;	1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 4. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 5. Surat Pernyataan Pimpinan telah Melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
			d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Time)	A/B/C/D	A	1		Seluruh indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Banjarnegara telah SMART(Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Time)	1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 4. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu	1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 2. Tanda Terima Pengiriman LKJIP tahun 2018 (melalui kurir) 3. Print out Bukti Pengiriman LKJIP tahun 2017 (melalui email)	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
			f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C/D	A	1		Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	1. Dokumen LKJIP Tahun 2018	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
			g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	1. Surat dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Nomor : 26/Bld/S/1/2019 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XXVI dan XXVII di Surabaya Tahun Anggaran 2019 2. Surat dari PN Banjarnegara Nomor : W12-U26/1323/KP.07.01/12/2018 Tentang Data Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Bendahara Penerimaan pada PN Banjarnegara 3. Surat Tugas Nomor : W12-U26/197/KP.07.01/1/2019 4. Surat dari Kanwil DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Purbalingga Nomor : UND-0001/WPJ.32/KP.09/2019 tentang Sosialisasi Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721 A2	a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan	
			h	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		A/B/C	A	1	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten	<p>1. Sertifikat Nomor :W.12U/72/KP.07.01/09/2013 atas nama Slamet Sudiarto, S.H. tentang Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk Peradilan Umum, TUN dan Peradilan Militer di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>2. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 pada PN Banjarnegara Kelas II</p> <p>3. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31a/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019</p> <p>4. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31b/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Kelas II Tahun 2019</p> <p>5. Dokumen SK KPN Banjarnegara Kelas II Nomor : W12.U26/31c/KP.07.01/SK.KPN/1/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis PN Banjarnegara Kelas II</p> <p>6. Dokumen SK KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/23/KP.07.01/SK.KPN/2/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Rencana Strategis PN Banjarnegara Tahun 2018</p> <p>7. Dokumen SK KPN Banjarnegara Nomor : W12.U26/71/KP.07.01/SK.KPN/1/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama pada PN Banjarnegara Tahun 2018</p>	<p>a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;</p> <p>b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ;</p> <p>c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten</p>

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)		15,0		15,00	100,00%			
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi		A/B/C	A	1	Public campaign telah dilakukan secara berkala	1. Banner pengendalian gratifikasi 2. Screenshoot website PN Banjarnegara mengenai gratifikasi 3. Publikasi Penacanaan Zona Integritas melalui media masa (radio, koran, media online) 4. Screenshoot website Penacanaan Pembangunan Zona Integritas 5. Screenshoot youtube video Penacanaan Pembangunan Zona Integritas 6. Capture kamera CCTV 7. Dokumen Sosialisasi Penanganan Gratifikasi	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign
		b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A/B/C	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/36/OT.00/SK/KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Penanganan Gratifikasi 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/37/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi 3. Bukti pengiriman dan penyerahan LHKPN 4. Screenshoot website Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang gratifikasi 5. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Gratifikasi	a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
	2	Penerapan SPIP (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	1. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/38/OT.00/SK.KPN/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/34/OT.00/SK.KPN/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Dokumen Sosialisasi SPIP: a. Undangan b. Berita Acara c. Notulen d. Daftar Hadir e. Dokumentasi Kegiatan	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/38/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Manajemen Resiko 2. Matriks Manajemen Resiko	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A/B/C	A	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	1. Dokumen Sosialisasi Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi 2. Surat kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk Sidang Tepat Waktu 3. Foto tabung apar 4. Foto tanda jalur evakuasi 5. Foto titik kumpul 6. Foto ruang tamu terbuka 7. Foto denah kantor	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
			d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A/B/C	A	1		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/6/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Hakim Pengawas Bidang	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
		3	Pengaduan Masyarakat (3)			3,00	100,00%			
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/34/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/45/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Petugas Meja Informasi 3. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/2/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Struktur/Tugas, dan Tanggung Jawab Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4. Foto Petugas dan Meja Pengaduan 5. Banner Penanganan Pengaduan 6. Foto alur penanganan pengaduan 7. Formulir tanda terima pengaduan	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti;	Laporan Triwulan I, II dan III penyelesaian pengaduan Tahun 2018 (NIHIL)	a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1		Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;	Laporan Triwulan I, II dan III penyelesaian pengaduan Tahun 2018 (NIHIL)	a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A/B/C	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan Tahunan penyelesaian pengaduan Tahun 2018 (NIHIL)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
		4	Whistle-Blowing System (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a.	Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi ?	Y/T	Ya	1		Whistle Blowing System telah di internalisasi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II	Dokumen Sosialisasi Perma 9 Tahun 2016 tentang Whistle-Blowing System: a. Daftar Hadir b. Notulen c. Dokumentasi	Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
		b.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/34/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>)	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C/D	A	1		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;	1. Laporan Pengaduan Bulan Januari 2019 (NIHIL) 2. Laporan Pengaduan Bulan Peburari 2019 (NIHIL)	a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
		d.	Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	1. Laporan Pengaduan Bulan Januari 2019 (NIHIL) 2. Laporan Pengaduan Bulan Peburari 2019 (NIHIL)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
		5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0		3,00	100,00%			

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/15/OT.00/SK.KPN/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/16/OT.00/SK.KPN/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A/B/C/D	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II	Dokumen Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Berita Acara d. Notulen e. Dokumentasi kegiatan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja	1. Dokumen Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Berita Acara d. Notulen e. Dokumentasi kegiatan 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/15/OT.00/SK.KPN/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan 3. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/16/OT.00/SK.KPN/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;	Laporan Tahunan Penyelesaian Benturan Kepentingan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;	Laporan Tahunan Penyelesaian Benturan Kepentingan	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,0		9,50	95,02%			
	1	Standar Pelayanan (3)	3,0		3,00	100,00%			
		a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		A/B/C	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;	1. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12.U26/45/OT.00/SK/KPN/11/2018 tentang Penunjukan Petugas Informasi 2. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12-U26/19/OT.00/SK/KPN/1/2019 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 3. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12.U26/3/KP/07.01.SK.KPN/10/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 4. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12.U26/2/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tentang Pembentukan Struktur, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 5. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12/26/28/KP/KP.07.01/SK/KPN/11/2018 tentang Penunjukan Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 6. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12-U26/8/HM.01.1/SK.KPN/10/2018 tentang Penunjukan HUMAS Pengadilan Negeri Banjarnegara 7. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12.U26/12/OT.00/SK/KPN/1/2019 tentang Penunjukan Panitia Pemilihan Roll Model 8. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor	a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		A/B/C/D	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	1. Banner Pelayanan Bagian Kepaniteraan Perdata 2. Banner Pelayanan Bagian Kepaniteraan Pidana 3. Banner Pelayanan Bagian Kepaniteraan Hukum 4. SK Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12-U26/20/OT.00/SK/KPN/1/2019 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara 5. Dokumentasi Banner Maklumat	a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
		c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A/B/C/D	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/2/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Struktur, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
		d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		A/B/C	A	1	Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	SK KPN Banjarnegara Nomor W12.U26/31/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Tim Evaluasi atau Penyesuaian SOP	a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
	2	Budaya Pelayanan Prima (3)	3,0		2,50	83,40%			

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
		a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah melakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/2/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Struktur, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A/B/C	A	1		Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	1. Screenshot website Pengadilan Negeri Banjarmasin 2. Banner Pelayanan Kepaniteraan Pidana 3. Banner Pelayanan Kepaniteraan Perdata 4. Banner Pelayanan Kepaniteraan Hukum	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
		c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C	B	0,5		Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/12/KP.07.01/SK/KPN/1/2019 tentang Penunjukan Role Model 2. Dokumentasi banner model 3. Dokumentasi foto pemberian reward/penghargaan kepada Role Model dan pegawai dengan kinerja terbaik 4. Piagam Penghargaan kepada Role Model 5. Buku Catatan Piagam Penghargaan	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
		d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	1		Seluruh pelayanan pada pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II sudah dilakukan secara terpadu	1. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/34/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan 2. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/45/OT.00/SK.KPN/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Petugas Meja Informasi 3. SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/2/KP.07.01/SK/KPN/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Struktur/Tugas, dan Tanggung Jawab Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) SK KPN Banjarmasin Nomor W12.U26/3/KP.07.01/SK.KPN/10/2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4. Foto Petugas dan Meja Pengaduan 5. Banner Penanganan Pengaduan 6. Foto alur penanganan pengaduan 7. Formulir tanda terima pengaduan	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
		e. Terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas II telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain;	1. Screenshot aplikasi antrian pelayanan PTSP 2. Screenshot aplikasi antrian sidang 3. Screenshot aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Harian dan 6 Bulanan 4. Screenshot aplikasi <i>Audio Text Recording</i> (ATR) di ruang sidang	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)		4,0		4,00	100,00%			

PENILAIAN				Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C	A	1		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala	1. Laporan Hasil IKM periode Januari 2018 s/d Juni 2018 2. Laporan Hasil IKM Periode Juli 2018 s/d Desember 2018	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A/B/C	A	1		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	Screenshoot website tentang publikasi hasil IKM	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1		Pengadilan Negeri Banjarnegara telah melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat	1. Dokumen Rapat Tinjauan Management untuk menindak lanjuti hasil internal audit dan IKM 2. Surat kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk Sidang Tepat Waktu 3. Foto Pelayanan 4. Foto Kebersihan	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
TOTAL PENGUNGKIT		60,0			58,73				
B.	HASIL (40)								
I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)								
1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	3,6	3,97	14,89	99,25%			Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	100	100	5,00	100,00%			
II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)								
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,371	16,86	84,28%			Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL		40,0			36,74	0,9185625			
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					95,47				